

PENGEMBANGAN MODEL AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH (SMA/MA)

Marjuki ^{1*}, Djemari Mardapi ², Badrun Kartowagiran ²

¹LPMP Bengkulu, ²Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Zainul Arifin, Tim. Indah, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu 38225, Indonesia

²Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: marjuki.pep@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperoleh model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel. Produk model yang dikembangkan adalah instrumen akreditasi dan prosedur akreditasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan. Pengembangan model dilakukan melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD). Validasi instrumen dilakukan oleh pakar, sedangkan validasi prosedur dilakukan oleh peserta FGD. Validitas isi instrumen ditentukan dengan cara menghitung indeks koefisien V Aiken, sedangkan estimasi reliabilitas instrumen ditentukan dengan teknik *intraclass correlation coefficient* (ICC) menggunakan SPSS. Validasi prosedur dilakukan dengan cara menghitung rerata skor hasil penilaian peserta FGD. Uji coba dilakukan untuk mengetahui keefektifan model yang dikembangkan. Subjek coba adalah praktisi terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Keefektifan model ditentukan dengan cara menghitung rerata skor hasil penilaian praktisi. Model akreditasi yang dikembangkan diberi nama Model Akreditasi SMART. Kesimpulan tentang Model Akreditasi SMART: (1) memiliki karakteristik sebagai model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel; (2) instrumen yang digunakan memiliki validitas dalam kategori sangat baik dan reliabilitas dalam kategori baik; (3) prosedur akreditasi seperti dipaparkan di atas mendapat penilaian baik dari peserta FGD; dan (4) keefektifan model termasuk kategori baik dan dapat digunakan.

Kata kunci: *model akreditasi, instrumen akreditasi, prosedur akreditasi*

DEVELOPING AN ACCREDITATION MODEL OF SENIOR SECONDARY SCHOOL (SMA/MA)

Abstract

This study is aimed at obtaining an effective, efficient and accountable accreditation model for Senior Secondary School/Madrasah Aliyah (SMA/MA). The product of the model developed is an accreditation instrument and procedure. This study is a research and development (R & D). The model developing was conducted through focus group discussion (FGD). Instrument validation was done by experts, while the procedure validation was performed by the FGD participants. The content validity of the instrument was determined by calculating the V Aiken coefficient index, while the instrument reliability estimation was determined by using intraclass correlation coefficient (ICC) using SPSS. Procedure validation was done by calculating the mean score of the FGD participants' assessment results. Trial was conducted to find out the effectiveness of the developed model. The subject of the trial was practitioners comprising of principals, teachers, and administrative personnels. The effectiveness of the model was determined by calculating the average score of the practitioners' assessment. The accreditation model developed was named SMART Accreditation Model. The conclusion on the SMART Accreditation Model are as follows: (1) having the characteristics of an effective, efficient, and accountable accreditation model for SMA/MA; (2) the content validity and reliability of the instrument used are in a very good category; (3) the afore-mentioned accreditation procedure is considered to be good by the FGD participants; and (4) the effectiveness of the model is in a good category and it can be used.

Keywords: *accreditation model, accreditation instrument, accreditation procedure*

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.21831/jpep.v22i1.9860>

Pendahuluan

Tolok ukur atau parameter mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah standar nasional pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Menteri Pendidikan Nasional, 2005). SNP meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti halnya pengembangan dan penyempurnaan kurikulum, pengembangan materi pembelajaran, perbaikan sistem evaluasi, pengadaan buku dan alat-alat pelajaran, perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta peningkatan mutu pimpinan sekolah (Depdiknas, 2002, p. 3). Namun demikian, upaya tersebut sampai sekarang belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Satuan pendidikan (sekolah/madrasah) dikatakan bermutu apabila satuan pendidikan tersebut telah memenuhi kriteria minimal dari setiap komponen SNP. Fokus peningkatan mutu pendidikan harus diarahkan pada bagaimana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dengan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal, maka berdampak pada pencapaian atau pemenuhan kriteria minimal pada komponen standar kompetensi lulusan. Menurut Mardapi (2003, p. 8), usaha peningkatan mutu pendidikan (tercapainya standar mutu kompetensi lulusan) dapat ditempuh melalui peningkatan mutu pembelajaran dan mutu sistem penilaian. Dengan kata lain, meningkatnya mutu pembelajaran yang dilaksana-

kan di tingkat satuan pendidikan akan meningkatkan mutu kompetensi lulusan.

Agar terjadi peningkatan mutu kompetensi lulusan, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan terpadu melalui peningkatan komponen standar pendidikan nasional yang lain. Kegiatan sistemik dan terpadu dalam upaya pemenuhan standar-standar mutu pendidikan disebut penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: (1) standar pelayanan minimal, (2) standar nasional pendidikan, dan (3) standar mutu pendidikan di atas SNP (Menteri Pendidikan Nasional, 2009). Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Akreditasi sekolah bertujuan memberikan pengakuan atas capaian standar mutu pendidikan yang ditetapkan dengan pemberian sertifikat status akreditasi. Objek penilaian dalam akreditasi sekolah mencakup delapan komponen standar nasional pendidikan. Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap satuan atau program pendidikan (Menteri Pendidikan Nasional, 2007, p. 1).

Dalam *Accreditation Handbook* (COA, 2008, p. 3), akreditasi didefinisikan sebagai proses verifikasi yang dilakukan oleh suatu lembaga independen terhadap program melalui penilaian secara menyeluruh apakah menunjukkan telah memenuhi atau melebihi standar umum dan standar program yang ditetapkan. Program yang akreditasi yang dinilai efektif dalam mempersiapkan pendidik dan menunjukkan mutu secara keseluruhan terhadap program-program umum yang ditetapkan. Status akreditasi dapat dicapai meskipun tidak semua standar dipenuhi.

Pagliarulo (1996, pp. 1114–1115) mengemukakan tiga aspek dalam akreditasi: (1) proses akreditasi diselenggarakan oleh suatu organisasi atau lembaga eksternal, (2) unit

yang diakreditasi dapat berupa program studi atau satuan pendidikan, dan (3) standar-standar tertentu harus ditentukan terlebih dulu.

ECA (2005, p. 4) mendefinisikan akreditasi sebagai suatu keputusan mandiri dan formal yang diperoleh dari suatu lembaga mandiri berdasarkan standar tertentu. Proses akreditasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari penilaian diri (*self-assessment*), penyiapan berbagai dokumen yang perlu diajukan menjalani akreditasi, penilaian eksternal oleh tim asesmen yang independen, dan penetapan keputusan akreditasi. Keputusan akreditasi tergantung pada penilaian mutu berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Keputusan akhir dari sebuah proses atau prosedur akreditasi yang berwibawa perlu dilakukan secara wajar meskipun diakui bahwa validitas terhadap hasil penilaian itu masih terbatas.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2003), disebutkan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Proses akreditasi dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam proses akreditasi terdapat kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Terkait dengan istilah ini, Huitt (2004, p. 1) memberikan konsep yang berbeda antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses kuantifikasi data. Penilaian adalah proses pengumpulan data untuk memahami sebuah isu atau objek secara lebih baik. Evaluasi adalah proses membandingkan antara data yang ada dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Mardapi (2008, p. 1), penilaian mencakup semua cara yang digunakan

untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok. Proses penilaian meliputi pengumpulan bukti-bukti tentang pencapaian suatu program. Dalam konteks ini, penilaian dapat berkaitan dengan semua proses pendidikan, antara lain: kurikulum, sarana dan prasarana, administrasi, metode pembelajaran, dan peserta didik. Selain itu, Mardapi (2008, p.8) juga mengemukakan bahwa evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan mutu, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Semua program kegiatan menggunakan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan program yang telah dicapai, mengetahui Keefektifan dan efisiensi program yang sedang berjalan dan memperoleh informasi untuk penetapan kegiatan berikutnya.

Griffin & Nix (1991, p. 15) berpendapat bahwa pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan sebuah hirarki. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan antara hasil observasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian adalah kegiatan menginterpretasi dan mendeskripsikan hasil pengukuran berdasarkan bukti-bukti yang ada. Evaluasi adalah *judgment* atas implikasi perilaku hasil penilaian.

Bedasarkan konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam proses akreditasi sekolah terdapat kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran terhadap objek yang dinilai menggunakan instrumen. Penilaian dilakukan melalui pengumpulan dan interpretasi data hasil pengukuran disesuaikan dengan kondisi nyata berdasarkan bukti-bukti nyata yang ada di sekolah. Selanjutnya evaluasi adalah proses pengambilan keputusan atau *judgment* dengan menggunakan acuan data hasil penilaian dan pengukuran, berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Hasil keputusan berupa penetapan status akreditasi sekolah.

Akreditasi sekolah harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan mutu, kinerja, dan produktivitas satuan pendidikan. Ada tiga hal penting dalam proses akreditasi

sekolah agar hasilnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, yaitu: masukan, proses, dan keluarannya. Akreditasi merupakan salah satu bentuk evaluasi yang penting dalam rangka mempertahankan mutu pendidikan (Patil & Pudlowski, 2005, pp. 49–58). Ada tiga tahapan proses pendidikan, yaitu: masukan (*input*), proses (*process*), dan hasil (*output*). Oleh karena itu, dalam proses akreditasi perlu dilakukan penilaian secara menyeluruh mencakup aspek-aspek input, proses, dan hasil.

Hasil akreditasi sekolah juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat apakah program telah direncanakan tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan apakah efisien dalam pelaksanaannya. Evaluasi mutu satuan pendidikan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh pihak satuan pendidikan itu sendiri, pihak penyelenggara pendidikan, dan pihak eksternal.

Kartowagiran (2006, p. 1), mengatakan evaluasi adalah suatu metode untuk mengetahui dan menilai keefektifan suatu program dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dalam bentuk informasi, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan.

Joint Committee on Standard Evaluation dalam Stufflebeam & Shinkfield (2007, p. 3), menyebutkan evaluasi adalah penilaian sistematis dari suatu objek yang bernilai atau memiliki kebaikan. Pendapat lain dikemukakan oleh Stark & Thomas (1994, p. 12) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk memastikan suatu keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi dalam rangka memberikan laporan data secara singkat yang berguna dalam memilih diantara berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan.

Secara formal ada enam fungsi evaluasi pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh (Worthen & Sander (1989, p. 21), yaitu: (1) menyiapkan dasar untuk membuat keputusan dan kebijakan, (2) melakukan penilaian hasil belajar, (3) melakukan evaluasi

kurikulum, (4) melaksanakan akreditasi sekolah, (5) monitoring penggunaan dana masyarakat, dan (6) memperbaiki materi dan program pendidikan. Tujuan evaluasi pendidikan adalah upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Model evaluasi yang lazim diterapkan untuk keperluan akreditasi sekolah adalah model evaluasi *professional judgment*. Asumsi dasar yang digunakan adalah “*Best evaluation is the expert opinion of qualified professional*” (Artcraft, 2005, p. 133). Evaluasi terbaik adalah pendapat ahli profesional yang memenuhi syarat. Evaluasi model *personal judgment* ini memfokuskan perhatian pada proses pendidikan dengan menggunakan pertimbangan profesional dan pengembangan standar-standar untuk program pendidikan. Model evaluasi *personal judgment* dapat disebut model SAVE yaitu: *Self-study*, *Visitation*, *Annual report*, dan *Evaluation panel*.

Melakukan penilaian mutu sekolah sama halnya dengan melakukan evaluasi mutu sekolah yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip dan standar-standar tertentu. *The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation* (Stufflebeam & Shinkfield, 2007, pp. 90-92) memberikan standar-standar dalam melaksanakan evaluasi program sekolah yaitu: manfaat (*utility*), kelayakan (*feasibility*), kesopanan (*propriety*), dan ketepatan (*accuracy*).

Evaluasi mutu sekolah harus dilakukan secara komprehensif yakni menyangkut semua aspek yang terlibat dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Thorndike, Cunningham, Thorndike, & Hagen (1991, p. 58) menyatakan bahwa tujuan dan kegunaan evaluasi pada pendidikan diarahkan kepada keputusan-keputusan yang menyangkut: (a) pengajaran, (b) hasil belajar, (c) diagnosis dan usaha-usaha perbaikan, (d) penempatan, (e) seleksi, (f) bimbingan dan konseling, (g) kurikulum, dan (h) penilaian kelembangaan. Agar keputusan yang diambil melalui evaluasi merupakan keputusan yang tepat, maka evaluasi mutu satuan pendidikan harus dirumuskan berdasarkan komponen-komponen dan indikator-indikator yang tepat.

Sutadji (2009, p. 54) menyatakan bahwa evaluasi terhadap mutu satuan pendidikan memerlukan kajian yang menyangkut komponen-komponen, indikator-indikator, dan kriteria yang digunakan. Acuan yang dapat digunakan untuk menilai mutu satuan pendidikan antara lain model sekolah efektif, model sekolah bermutu, dan model determinan mutu pendidikan.

Beberapa penelitian yang relevan dengan akreditasi sekolah dapat dipaparkan sebagai berikut. Penelitian Lindsay & Campbell (2002, pp. 29–31) tentang pengujian status akreditasi sebagai salah satu indikator mutu program pendidikan menyatakan bahwa status akreditasi sering dianggap sebagai indikator mutu program pendidikan. Penelitian Bennett (2000, pp. 1–6) tentang akreditasi sekolah independen sebagai pedoman untuk memilih sekolah, diperoleh informasi bahwa akreditasi terhadap program pendidikan di sekolah dilakukan untuk mengetahui apakah isi program pendidikan yang diselenggarakan sekolah, apakah sekolah memiliki standar-standar yang tinggi, dan apakah ada komitmen dari sekolah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu programnya. Penelitian Sumarno (2000, p. 58) tentang pengembangan model akreditasi SLTP dan SMU merekomendasikan antara lain: model akreditasi sekolah harus memenuhi prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi dengan subjek satuan analisis sekolah dan objek pokok dari akreditasi sekolah adalah mutu sekolah, kemampuan, dan kinerja sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan hasil diskusi sesama anggota BAP-S/M provinsi Bengkulu, asesor akreditasi SMA/MA, dan pengalaman sebagai asesor akreditasi SMA/MA, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan dan hasil akreditasi, antara lain: (a) belum ditegakkan sepenuhnya prinsip-prinsip akreditasi dalam proses penilaian kelayakan sekolah/madrasah, (b) masih ada asesor yang belum memahami standar nasional pendidikan dan perangkat akreditasi yang digunakan, (c) masih ditemukan asesor

yang kurang teliti saat melakukan verifikasi dan validasi data.

Aswandi (2009, p. 1) mengemukakan bahwa: (a) belum adanya penilaian kinerja bagi asesor, (b) akreditasi belum berjalan secara efektif, (c) rekomendasi hasil akreditasi belum digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan sekolah, (d) kurang tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan akreditasi terutama dalam memilih waktu yang tepat dengan memperhatikan kondisi alam dan geografis dan hari libur sekolah.

Hasil survei keterlaksanaan akreditasi sekolah/madrasah yang dilakukan peneliti pada tahun 2009 dengan melibatkan responden sebanyak 45 orang terdiri dari kepala sekolah/madrasah, guru, dan tenaga administrasi dari 5 SMA/MA di Kota Yogyakarta diperoleh informasi bahwa: (1) sebanyak 37,78% responden mengaku sekolahnya kurang siap diakreditasi; (2) sebanyak 24,44% responden menyatakan kesulitan dalam mengisi instrumen akreditasi; (3) sebanyak 31,11% responden menyatakan kesulitan mengisi instrumen pengumpul data dan informasi pendukung; (4) sebanyak 22,22% responden menilai kemampuan asesor dalam melakukan verifikasi dan validasi data masih kurang; (5) sebanyak 28,89% responden menilai sebagian asesor kurang mematuhi norma, tata krama, dan tata terib pelaksanaan akreditasi; (6) sebanyak 24,44% responden menilai pihak sekolah/madrasah kurang mematuhi norma, tata krama, dan tata terib pelaksanaan akreditasi; dan (7) sebanyak 60% responden mengaku rekomendasi hasil akreditasi umumnya belum ditindaklanjuti. Hasil survei ini mengindikasikan bahwa implementasi model akreditasi BAN-S/M belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

Permasalahan dalam penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah dan implementasi model akreditasi BAN-S/M sebagaimana diuraikan di atas, berdampak pada kepercayaan *stakeholders* dan masyarakat terhadap hasil akreditasi sekolah. Masih ada pihak yang mempersepsikan bahwa pelaksanaan akreditasi kurang akuntabel dan belum sepenuhnya terpercaya. Sebagai contoh: (1)

opini yang pernah dimuat pada *Harian Lampung Pos* tanggal 27 Januari 2005 dengan judul “Menyoal Akreditasi Sekolah/Madrasah”, tulisan ini mengindikasikan bahwa objektivitas penilaian dalam proses akreditasi sekolah/madrasah masih diragukan atau kurang akuntabel; dan (2) artikel yang dimuat di *Harian Solo Pos* tanggal 23 Agustus 2007 yang berjudul “Akreditasi Benarkah Demi Peningkatan Mutu Pendidikan?”, penulis artikel mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap proses evaluasi dalam akreditasi yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan memperoleh model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel. Model akreditasi yang efektif, efisien, dan akuntabel diasumsikan dapat menghasilkan informasi tentang mutu sekolah/madrasah yang objektif, akurat, komprehensif, dan terpercaya yang pada akhirnya mampu mendorong dan memotivasi sekolah/madrasah untuk secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan model penelitian dan pengembangan modifikasi gabungan model *research, development and diffusion* (model R, D & D) dari Hopkins dan Clark (Havelock, 1976) dan model *research and development* (model R & D) dari Borg & Gall (1983). Pengembangan model dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) studi permasalahan dan pengumpulan data, (2) perencanaan pengembangan model, (3) pengembangan model, (4) uji coba tahap 1, (5) uji coba tahap 2, (6) menilai keefektifan model, dan (7) penyusunan produk akhir.

Studi permasalahan dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan angket. Sumber informasi adalah anggota BAP-S/M provinsi Bengkulu, asesor akreditasi SMA/MA, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Perencanaan pengembangan model, antara lain: (1) menyiapkan bahan referensi dan regulasi sebagai bahan rujukan untuk menyusun desain model akreditasi, (b) menen-

tukan pakar dan praktisi yang akan dilibatkan dalam pengembangan dan uji coba model, (c) memperkiraan lamanya waktu untuk kegiatan pengembangan model akreditasi, dan (d) menentukan sekolah untuk uji coba model.

Pengembangan model dilakukan mulai dari penyusunan draf model, pembahasan dan telaah draf model melalui kegiatan *focus group discussion* (FGD), dan validasi model sebelum diujicobakan. Selanjutnya dilakukan uji coba model sebanyak 2 kali. Selesai uji coba dilakukan revisi berdasarkan komentar dan saran dari praktisi. Penilaian keefektifan model dilakukan setelah selesai dilakukan uji coba. Berdasarkan hasil penilaian keefektifan model, dilakukan penyusunan produk akhir.

Pengembangan model tahap pertama adalah: (1) menentukan kriteria model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel; (2) menyusun aspek atau komponen penilaian akreditasi; (3) menyusun indikator kunci untuk setiap komponen standar akreditasi. FGD Tahap 1 melibatkan peserta dari unsur anggota BAP-S/M provinsi Bengkulu dan asesor akreditasi SMA/MA membahas, menelaah, dan memberikan saran perbaikan tentang kriteria model, komponen penilaian, dan rumusan indikator kunci.

Berdasarkan hasil FGD Tahap 1, dilakukan pengembangan tahap kedua: (1) membuat rancangan pengembangan instrumen akreditasi, (2) menyusun kisi-kisi pengembangan instrumen akreditasi; (3) menyusun item-item isian data dan pernyataan dalam instrumen akreditasi, (4) membuat desain prosedur akreditasi, dan (5) membuat panduan penggunaan. Pengembangan instrumen akreditasi dan prosedur akreditasi dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria model yang efektif, efisien, dan akuntabel. FGD Tahap 2 melibatkan peserta dari unsur promotor/ kopromotor, dosen/pakar evaluasi pendidikan, dan mahasiswa S3 prodi penelitian dan evaluasi pendidikan bertujuan membahas, menelaah, dan memberi saran perbaikan terhadap desain instrumen, prosedur, dan panduan.

Instrumen akreditasi SMA/MA yang dikembangkan divalidasi oleh tiga pakar terdiri dari pakar akreditasi sekolah/madrasah, pakar manajemen pendidikan, dan pakar evaluasi pendidikan. Validasi pakar dilakukan untuk mengetahui validitas isi dan mengestimasi reliabilitas instrumen. Adapun prosedur akreditasi SMA/MA yang dikembangkan divalidasi oleh peserta FGD Tahap 2.

Data hasil FGD berupa komentar dan saran dianalisis dengan teknik deskriptif. Data hasil penilaian pakar terhadap instrumen akreditasi dianalisis dengan cara menghitung indeks koefisien V Aiken untuk mengetahui validitas isi instrumen, sedangkan estimasi reliabilitas dihitung dengan teknik *intraclass correlation coefficient (ICC)* menggunakan SPSS. Validitas prosedur akreditasi dilakukan dengan cara menghitung rerata skor berdasarkan data hasil penilaian peserta FGD.

Kriteria validitas isi instrumen disajikan pada Tabel 1. Kriteria reliabilitas instrumen disajikan pada Tabel 2. Kriteria validitas prosedur akreditasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 1. Kriteria Validitas Isi Instrumen

Koefisien V	Kategori
$0,75 < V \leq 1,00$	Validitas sangat baik
$0,50 \leq V \leq 0,75$	Validitas baik
$V < 0,50$	Validitas kurang baik

Tabel 2. Kriteria Reliabilitas Instrumen

ICC	Kategori
$0,75 < V \leq 1,00$	Reliabilitas sangat baik
$0,50 \leq V \leq 0,75$	Reliabilitas baik
$V < 0,50$	Reliabilitas kurang baik

Tabel 3. Kriteria Validitas Prosedur

Skor	Kategori
$X > 3,4$	Sangat baik
$2,8 < X \leq 3,4$	Baik
$2,2 < X \leq 2,8$	Cukup baik
$1,6 < X \leq 2,2$	Kurang baik
$X \leq 1,6$	Tidak baik

Uji coba dilakukan sebanyak 2 kali. Uji coba pertama dilakukan di 3 SMA dan uji coba kedua dilakukan di 6 SMA. Setiap SMA tempat uji coba diberikan satu set terdiri: panduan penggunaan, prosedur akreditasi, dan instrumen akreditasi. Subjek coba diminta mengisi instrumen akreditasi. Setelah instrumen selesai diisi, dilakukan verifikasi dan validasi isian data pada instrumen akreditasi. Selanjutnya dilakukan wawancara guna menggali informasi kelebihan dan kekurangan model yang diujicobakan. Terakhir, subjek coba diminta memberikan penilaian keefektifan model.

Subjek coba terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dengan kriteria pernah terlibat sebagai tim penyiapan akreditasi di sekolahnya.

Data hasil wawancara berupa catatan komentar dan respon jawaban dari subjek coba dianalisis secara deskriptif. Data hasil penilaian keefektifan model dianalisis dengan cara menghitung rerata skor. Hasil perhitungan rerata skor kemudian dibandingkan dengan kriteria keefektifan seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Keefektifan Model

Skor	Kategori	Kesimpulan
$X > 3,4$	Sangat baik	Dapat digunakan dan dicontoh
$2,8 < X \leq 3,4$	Baik	Dapat digunakan
$2,2 < X \leq 2,8$	Cukup baik	Dapat digunakan dengan sedikit perbaikan
$1,6 < X \leq 2,2$	Kurang baik	Dapat digunakan dengan banyak perbaikan
$X \leq 1,6$	Tidak baik	Belum dapat digunakan

Hasil Pengembangan dan Pembahasan

Hasil FGD Tahap 1

Hasil pengembangan model melalui FGD Tahap 1 diperoleh konsensus atau kesepakatan sebagai berikut: (1) kriteria model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel harus memenuhi kriteria tertentu; (2) urutan dan penamaan komponen

yang menjadi objek penilaian akreditasi sekolah/madrasah dapat tidak harus sama dengan urutan dan penamaan seperti urutan dan penamaan standar nasional pendidikan; dan (3) indikator kunci dikembangkan dari standar-standar akreditasi mengacu pada regulasi yang relevan dengan standar nasional pendidikan.

Kriteria model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel disajikan pada Tabel 5. Kriteria tersebut selanjutnya menjadi karakteristik model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan.

Tabel 5. Kriteria Model Akreditasi SMA/MA

Kriteria	Deskripsi
Efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk instrumen sederhana dan praktis. - Petunjuk teknis pengisian instrumen jelas dan mudah dipahami. - Instrumen dapat menjangkau data secara akurat. - Bukti-bukti pemenuhan standar akreditasi terukur. - Prosedur praktis
Efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Pengisian data pada instrumen mudah dikerjakan. - Proses verifikasi dan validasi mudah dilakukan - Menghasilkan profil mutu sekolah secara komprehensif
Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur menjamin pihak sekolah bertindak jujur dan transparan dalam memberikan data - Prosedur menjamin asesor bertindak jujur dan objektif dalam melakukan verifikasi dan validasi data.

Berdasarkan Tabel 5, dapat dikemukakan dua aspek penting dalam model akreditasi SMA/MA, yaitu: (1) aspek instrumen, dan (2) aspek prosedur. Model akreditasi SMA/MA dengan instrumen dan prosedur akreditasi yang memenuhi kriteria efektif, efisien, dan akuntabel seperti dicantumkan pada Tabel 5 diasumsikan mampu mendorong dan memotivasi pihak sekolah untuk

melakukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Urutan dan penamaan komponen yang menjadi objek penilaian dalam akreditasi SMA/MA disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Urutan dan Penamaan Komponen Akreditasi SMA/MA

Urutan dan Nama Komponen	Acuan Regulasi
1. Standar Kompetensi Lulusan	Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Penilaian	Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian
3. Standar Proses Pembelajaran	Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
4. Standar Isi Kurikulum	Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Permendiknas No. 13 Tahun 2006 tentang Standar Kepala Sekolah; Permendiknas No. 16 Tahun 2006 tentang Standar Guru; Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Konselor; Permendiknas No. 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi; Permendiknas No. 25 Tahun 2008 tenaga Perpustakaan; dan Permendiknas No. 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium.
6. Standar Sarana dan Prasarana	Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pengelolaan	Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
8. Standar Pembiayaan	Permendiknas No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya

Tabel 6 menunjukkan urutan dan penamaan komponen akreditasi sedikit berbeda bila dibanding dengan urutan dan penamaan model yang sudah ada, yakni model akreditasi BAN-S/M. Urutan dan penamaan dalam model akreditasi SMA/MA yang

dikembangkan diasumsikan bersifat lebih generik dan tetap mencakup aspek mutu sekolah yang bersifat komprehensif. Selain itu, acuan regulasi yang digunakan pengembangan instrumen akreditasi disesuaikan dengan regulasi yang terbaru yakni regulasi tentang: standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar isi, dan standar proses.

Regulasi sebagaimana tercantum pada 6 digunakan sebagai acuan dalam pengembangan indikator kunci untuk setiap komponen standar akreditasi.

Contoh indikator kunci untuk standar akreditasi dalam model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Indikator Kunci untuk Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan

No. Item	Indikator Kunci
1.1	Lulusan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab.
1.2	Lulusan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
1.3	Lulusan memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret.
1.4	Lulusan melanjutkan perguruan tinggi.

Indikator kunci dari setiap komponen standar akreditasi digunakan sebagai acuan dalam pengembangan instrumen akreditasi. Prinsip pengembangan instrumen diselaraskan dengan kriteria model akreditasi SMA/MA yang efektif dan efisien.

Hasil FGD Tahap 2

Hasil pengembangan model melalui FGD Tahap 2 diperoleh desain model akreditasi SMA/MA terdiri dari: (1) instrumen akreditasi, (2) prosedur akreditasi, dan (3) panduan penggunaan. Instrumen akreditasi dalam model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan divalidasi oleh tiga pakar yaitu: pakar akreditasi sekolah/madrasah, pakar manajemen pendidikan, dan pakar evaluasi pendidikan.

Hasil analisis validitas isi instrumen dengan cara menghitung indeks koefisien V Aiken. Koefisien validitas aiken berkisar antara 0,76 sampai dengan 0,92, dengan rata-rata mencapai 0.81 (lihat tabel 8). Hal ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki validitas isi termasuk kategori sangat baik.

Tabel 8. Hasil Analisis Koefisien Aiken'V

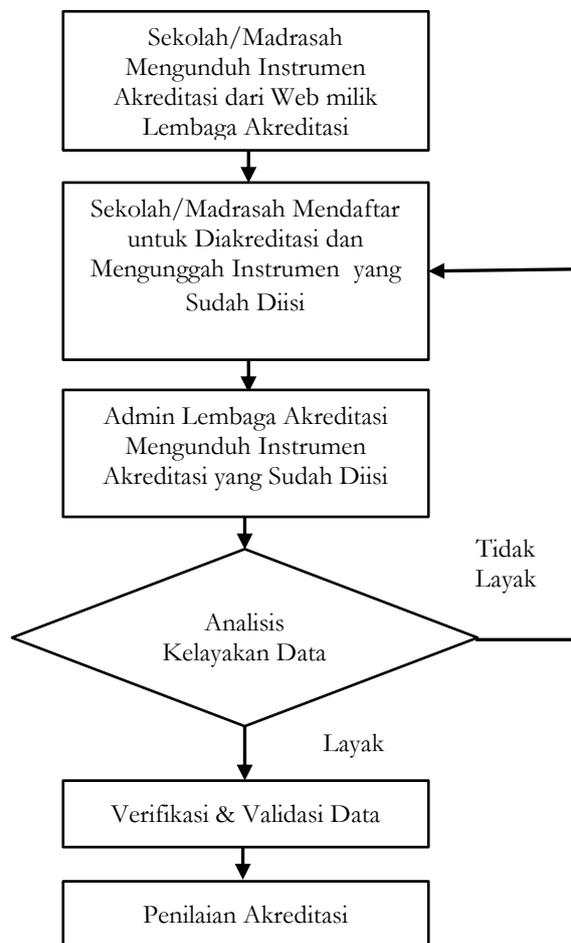
Komponen Penilaian Akreditasi	Rerata Indeks Koefisien V
Standar Akreditasi 1. Kompetensi Lulusan	0,81
Standar Akreditasi 2. Penilaian	0,81
Standar Akreditasi 3. Proses Pembelajaran	0,79
Standar Akreditasi 4. Isi Kurikulum	0,80
Standar Akreditasi 5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0,82
Standar Akreditasi 6. Sarana dan Prasarana	0,92
Standar Akreditasi 7. Pengelolaan	0,76
Standar Akreditasi 8. Pembiayaan	0,81
Rerata Indeks Koefisien Aiken'V Keseluruhan	0,81

Hasil analisis estimasi reliabilitas instrumen dengan teknik *interclass correlation coefficient* (ICC) menggunakan SPSS. Hasil analisis ICC dari ketiga rater (penilai) sebesar 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen mempunyai reliabilitas termasuk kategori baik (lihat Tabel 9).

Tabel 9. Hasil Analisis Interclass Correlation Coefficient (ICC)

	ICC	95% Confidence Interval		F Test with True Value 0			
		Lower Bound	Upper Bound	Value	df1	df2	Sig
Single Measures	.506 ^a	.348	.651	4.070	54	108	.000
Average Measures	.754 ^c	.616	.849	4.070	54	108	.000

Hasil pengembangan prosedur akreditasi diperoleh prosedur dengan langkah-langkah seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur Akreditasi SMA/MA yang Dikembangkan

Pihak sekolah mengunduh instrumen akreditasi yang tersedia di web milik lembaga akreditasi. Pihak sekolah mengisi instrumen akreditasi dalam bentuk aplikasi *microsoft excel*. Isian data akreditasi ini *hyper-link* dengan: (1) instrumen pernyataan capaian standar akreditasi dan (2) hasil penilaian akreditasi. Selanjutnya pihak sekolah mendaftar untuk diakreditasi dan mengunggah instrumen akreditasi yang sudah diisi disertai file dalam bentuk dokumen, foto, atau video.

Langkah berikutnya, admin yang bekerja pada lembaga akreditasi mengunduh instrumen akreditasi dari sekolah yang akan diakreditasi. Data yang diperoleh dianalisis kelayakannya. Analisis dikerjakan oleh ase-

sor. Apabila hasil analisis diperoleh keputusan layak untuk diakreditasi, maka lembaga akreditasi menugaskan asesor untuk melakukan visitasi guna memverifikasi dan memvalidasi data yang telah diberikan oleh pihak sekolah/madrasah. Langkah terakhir adalah penilaian akreditasi berdasarkan data, bukti, dan catatan hasil visitasi yang dikumpulkan oleh asesor.

Prosedur akreditasi seperti dipaparkan di atas mendapat penilaian baik dari peserta FGD. Tabel 10 disajikan hasil penilaian (validasi) prosedur akreditasi. Berdasarkan Tabel 10 diperoleh informasi rerata skor keseluruhan sebesar 3,16 termasuk kategori baik.

Tabel 10. Hasil Penilaian Prosedur Akreditasi

Aspek yang Dinilai	Rerata Skor
Prosedur praktis	3,35
Prosedur menjamin pihak sekolah bertindak jujur dan transparan. .	3,32
Prosedur menjamin asesor bertindak jujur, adil, dan objektif.	2,91
Proses verifikasi dan validasi mudah dikerjakan	2,96
Fisibilitas (dapat diterapkan)	3,26
Rerata Skor Keseluruhan	3,16

Tabel 11. Hasil Penilaian Keefektifan Model

Aspek yang Dinilai	Rerata Skor
Bentuk instrumen sederhana	3,39
Keterbacaan petunjuk teknis pengisian instrumen	3,30
Keakuratan data	3,43
Kesesuaian data dengan bukti pendukung	3,39
Prosedur praktis	3,52
Kemudahan pengisian data	3,22
Kemudahan melakukan verifikasi dan validasi data	3,17
Komponen penilaian komprehensif	3,39
Kepercayaan dapat diterapkan secara jujur dan objektif	3,22
Fisibilitas (kemungkinan dapat digunakan)	3,52
Kejelasan panduan penggunaan	3,48
Rerata Skor Keseluruhan	3,40

Hasil uji coba, diperoleh keefektifan model berdasarkan penilaian dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi di sekolah tempat uji coba yang disajikan pada Tabel 11. Berdasarkan Tabel 11 diperoleh informasi rerata skor keefektifan model sebesar 3,40 termasuk kategori baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan dapat digunakan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat disampaikan simpulan sebagai berikut. Produk yang dikembangkan memiliki karakteristik sebagai model akreditasi SMA/MA yang efektif, efisien, dan akuntabel yaitu: (1) bentuk instrumen sederhana/praktis, (2) petunjuk teknis pengisian instrumen jelas dan mudah dipahami, (3) instrumen dapat menjaring data secara akurat, (4) bukti pendukung data terukur, (5) prosedur praktis, (6) pengisian data mudah dikerjakan, (7) verifikasi dan validasi data mudah dilakukan, (8) menghasilkan profil mutu sekolah secara komprehensif, (9) prosedur menjamin pihak sekolah bertindak jujur dan transparan; dan (10) prosedur menjamin asesor bertindak jujur dan objektif dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Model akreditasi SMA/MA yang dikembangkan ini diberi nama Model Akreditasi SMART.

Instrumen akreditasi dalam Model Akreditasi SMART memiliki validitas isi berdasarkan indeks koefisien Aiken's V sebesar 0,81 termasuk kategori sangat baik dan reliabilitas berdasarkan *Interclass Correlation Coefficient* (ICC) sebesar 0,75 termasuk kategori baik.

Prosedur akreditasi dalam Model Akreditasi SMART terdiri dari enam langkah yaitu: (1) sekolah/madrasah mengunduh instrumen akreditasi dari web milik lembaga akreditasi (*online*), (2) sekolah/madrasah mendaftar untuk diakreditasi dan mengunggah instrumen yang sudah diisi (*online*), (3) admin lembaga akreditasi mengunduh instrumen akreditasi yang sudah diisi (*online*), (4) analisis kelayakan data, (5) veri-

fikasi dan validasi data melalui visitasi, dan (6) penilaian akreditasi.

Prosedur akreditasi dalam Model Akreditasi SMART mendapat penilaian dari peserta FGD dengan rerata skor sebesar 3,16 termasuk kategori baik. Model Akreditasi SMART mendapat penilaian dari kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dengan rerata skor sebesar 3,12 termasuk kategori baik dan model dapat digunakan.

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, maka penelitian ini dapat memberikan saran sebagai berikut. Pihak SMA/MA dapat memanfaatkan instrumen dalam Model Akreditasi SMART sebagai alat dalam melakukan evaluasi diri sekolah (EDS). Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag, dan Pengurus Yayasan penyelenggara pendidikan dapat memanfaatkan Model Akreditasi SMART sebagai alat pengendalian dan evaluasi mutu SMA/MA yang menjadi kewenangannya. LPMP dapat memanfaatkan Model Akreditasi SMART sebagai alat dalam melakukan pemetaan mutu SMA/MA dalam kerangka penjaminan mutu. BAN-S/M dapat mengadopsi, mengadaptasi, dan memanfaatkan Model Akreditasi SMART sebagai bahan referensi dalam pengembangan Model Akreditasi BAN-S/M. Pakar evaluasi pendidikan dan peneliti lainnya dapat menggunakan Model Akreditasi SMART sebagai bahan rujukan dan referensi untuk keperluan penelitian sejenis dan/atau mengembangkan hasil penelitian pengembangan ini lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Artcraft. (2005). *Program evaluation*. Sydney: Artcraft Research.
- Aswandi. (2009). Akreditasi sekolah 2009. Retrieved December 25, 2010, from <http://www.pontianak/post.com/?mb=berita.detail&id=27077>
- Bennett, W. . (2000). *Independen school accreditation: A guide to school choice*. Retrieved December 22, 2008, from Error! Hyperlink reference not valid.

- Borg, W. R., & Gall, M. D. (1983). *Educational research: An introduction* (4th ed.). New York: Longman Publishing.
- COA. (2008). Accreditation handbook: definition of stipulations 2007-08. Retrieved July 19, 2008, from https://www.ctc.ca.gov/docs/default-source/educator-prep/coa-agendas/2008-05/2008-05-item-16.pdf?sfvrsn=ba0760a2_0
- Depdiknas. (2002). *Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah: konsep dasar*. Jakarta: Depdiknas.
- ECA. (2005). Accreditation in the European higher education area. Retrieved July 19, 2008, from http://www.aic.lv/bologna/Bologna/contrib/Statem_oth/ECA_on_Bergen.pdf
- Griffin, P., & Nix, P. (1991). *Educational assessment and reporting*. Sydney: Harcourt Brace Javanovic Publisher.
- Havelock, R. G. (1976). *Planning for innovation through dissemination and utilization of knowledge*. Michigan: Institute for Social Research The University of Michigan.
- Huitt, W. (2004). *Assessment, measurement, and evaluation. Educational Psychology Interactive*. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved from <http://www.edpsycinteractive.org/topics/measeval/measeval.html>
- Kartowagiran, B. (2006). *Prinsip-prinsip dasar monitoring dan implementasinya. Bahan Penyelenggaraan Calon Tim Pelatih Monitoring dan Evaluasi Provinsi DKI Jakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lindsay, D. H., & Campbell, A. (2002). An examination of AACSB accreditation status an accounting program quality indikator. Retrieved October 22, 2008, from <http://www.sbaer.uca.edu/research/TemporarilyDisabled---wdsi/2002/pdffiles/papers/012.pdf.htm>
- Mardapi, D. (2003). *Konstruksi tes dan analisis butir* (Makalah tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Mardapi, D. (2008). *Teknik penyusunan instrumen tes dan nontes*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (2005).
- Menteri Pendidikan Nasional. (2007). *Pedoman pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah*. Jakarta: Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
- Menteri Pendidikan Nasional. Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (2009).
- Pagliarulo, M. A. (1996). Accreditation: Its nature, process, and effective implementation. *Physical Therapy Education Journal*, 66(7), 1114–1118.
- Patil, A. S., & Pudlowski, Z. J. (2005). Important issues of the accreditation and quality assurance and a strategy in the development of an accreditation framework for engineering courses. *Global Journal of Engineering Education*, 9(1), 49–58.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Pub. L. No. 20 (2003). Indonesia.
- Stark, J. S., & Thomas, A. (1994). *Assessment and program evaluation*. Needham Heights: Simon and Schuster Custom Publishing.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation, theory, models, and applications*. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Sumarno. (2000). *Pengembangan model akreditasi sekolah negeri tingkat SLTP dan SMU*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Sutadji, E. (2009). *Model evaluasi mutu sekolah: pengembangan instrumen untuk menetapkan mutu*. Disertasi tidak dipublikasikan. Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thorndike, R. M., Cunningham, G. K., Thorndike, R. L., & Hagen, E. P. (1991). *Measurement and evaluation in psychology and education* (5th ed.). New York: Macmillan Publishing Co, Inc.
- Worthen, B. R., & Sander, J. R. (1989). *Educational evaluation: theory and practice*. Worthington, Ohio: Charles A. Jones Publishing Company.